



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 12%

Date: Monday, January 27, 2020

Statistics: 553 words Plagiarized / 4467 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

POLITIK PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU Isril1), Rury Febrina2), Zulfa Harirah MS3) 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Ipfisip_ur@yahoo.com 2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau rury_febrina@yahoo.com 3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id Abstrak Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan.

Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola dengan baik maka akan semakin menuju titik kritis. Konsekuensi hukum amanat UUD pasal 28 H ayat 1 bahwa Pemerintah menjadi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga memantik semangat untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Penelitian ini hadir untuk melihat sejauh mana wewenang yang dibagi itu menutupi keterbatasan-keterbatasan melalui sudut pandang implementasi kebijakan.

Permasalahan akan dibedah melalui teori implementasi kebijakan David C. Korten. Berbagai data yang diperoleh dari hasil metode studi kasus kemudian dikembangkan sesuai dengan teori guna memperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal penting untuk melihat implementasi kebijakan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Pada tahapan ini, titik fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh

pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga kota). Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif.

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I merupakan perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Pihak swasta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan dari hadirnya pihak swasta dalam pengelolaan sampah yaitu optimalisasi pada tahapan proses pengangkutan sampah. Keywords: Kemitraan, Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN Penelitian ini merupakan upaya lanjutan untuk melacak dan mengawal pelaksanaan pengelolaan sampah. Mengingat bahwa pengelolaan sampah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda karena semakin menunjukkan titik kritis.

Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat turut mempengaruhi bertambahnya volume sampah. Belum lagi proses pengelolaan sampah yang ada masih banyak yang belum sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan. Hal ini yang kemudian melahirkan ancaman bagi seluruh makhluk hidup sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sampah telah menjadi masalah nasional bahkan global. Amanat UUD pasal 28 H ayat 1 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Dalam UU no 32 tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan sampah menjadi sebuah usaha dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga memantik semangat untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Hadirnya sektor privat dalam urusan pelayanan publik diyakini mampu menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan masalah sampah yang sudah akut._

Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kewenangan dalam mengatur urusan publik, tetapi juga membaginya kepada pihak lain atau yang dikenal sebagai konsep Good Governance._ Keterlibatan sektor privat ini dianggap mampu memenuhi harapan-harapan stakeholders sehingga dalam proses pengambilan keputusan akan memperoleh pertimbangan yang matang._ Keterlibatan swasta dalam memberikan pelayanan publik tidak terlepas dari keunggulan swasta dalam beberapa dimensi. Pertama, sumberdaya.

Alasan sederhana untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta dikemukakan ketika pemerintah kekurangan sumberdaya – atau kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya – yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah misi. Kedua, produktivitas. Bahwa agen eksternal akan menjalankan kapasitas produksi yang tidak dimiliki pemerintah. Dengan menjalin kemitraan, maka pemerintah akan dapat menekan batas efisiensi untuk menurunkan biaya._

Logika semacam ini merupakan agenda besar dari transformasi reformasi birokrasi. Di Kota Pekanbaru, kemitraan pengelolaan sampah dengan swasta ini sudah dilakukan dua periode yaitu pada tahun 2015 dan pada tahun 2018. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekanbaru menjalin kemitraan dengan PT Multi Guna Inti atau MGI. Perusahaan tersebut memperoleh nilai kontrak sebesar Rp. 53 miliar.

Namun hingga penghujung 2016, PT Multi Guna Inti tidak berhasil menyelesaikan masalah sampah di 8 kecamatan yang menjadi ruang lingkungannya. Ditahun 2018, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pekanbaru kembali membuka lelang proyek pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hasil lelang menunjukkan bahwa PT. Samhana Indah sebagai pemenang tender pengelolaan sampah di zona 2 yang terdiri dari Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Bukit Raya, Sail, dan Tenayan Raya. Proses penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan PT Samhana Indah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018.

Setelah kegagalan pada periode pertama, ini kesempatan kedua bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan efisien. Kemitraan tersebut menjadi satu langkah untuk membaca garis batas yang menghasilkan kejelasan "pemerintah" dalam berurusan dengan tujuan publik. Keterbatasan sarana, prasarana, maupun sumberdaya itulah yang mengharuskan Pemerintah Kota Pekanbaru berbagi peran kepada sektor privat.

Kemitraan tersebut menjadi satu langkah untuk membaca garis batas yang menghasilkan kejelasan "pemerintah" dalam berurusan dengan tujuan publik. Dalam pelaksanaannya, dapat dinilai perbedaan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru saat menjalin kemitraan dengan swasta. Sejauh mana wewenang yang dibagi itu menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik dan menutupi keterbatasan-keterbatasan yang menyeruak.

Adalah benar bahwa kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk optimalisasi dalam hal pengerjaannya. Namun pernyataan ini masih perlu dibuktikan secara empiris. Sehingga perlu ditelisik lebih lanjut, sejauh mana harapan sudah terjewantahkan dalam proses implementasi. TINJAUAN PUSTAKA Kerangka Teori Implementasi kebijakan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam kebijakan publik._

Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Edward III bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan kebijakan menjadi hal yang sia-sia. Implementasi kebijakan akan menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, implementasi kebijakan menjadikan tujuan kebijakan direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah.

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dianalisis dari perspektif proses implementasi dan juga hasil implementasi. Pada perspektif proses, sebuah kebijakan yang dikatakan berhasil jika seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan

kebijakan. Sedangkan perspektif hasil melihat bahwa keberhasilan kebijakan dapat diketahui dari kesesuaian tujuan program dengan dampak kebijakan yang diinginkan.

Sebuah kebijakan yang dibuat harus semaksimal mungkin memperoleh apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam literatur mengenai implementasi kebijakan, Korten membuat model kesesuaian implementasi kebijakan dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini menunjukkan kesesuaian antara tiga elemen, yaitu program kebijakan, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Gambar 2.1

Model Kesesuaian David C. Korten Sumber: David C. Korten (1988) dalam Tarigan, hlm 19) Gambar diatas menjelaskan bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil diimplementasikan jika terdapat kesesuaian antara 3 unsur, yaitu: Kesesuaian antara program dan penerima manfaat Poin ini menekankan pada kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana Yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan dalam program Pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana Hal ini maksudnya adalah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi dapat memperoleh output dari kelompok sasaran. Model kesesuaian implementasi kebijakan yang dikembangkan David Korten ini telah menambah khasanah dalam kajian kebijakan publik.

Berdasarkan pola yang disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa kesesuaian antara 3 unsur tersebut menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka output yang dihasilkan tidak dapat memberi manfaat. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugasnya, maka output program tidak akan terdistribusi secara tepat.

Terakhir, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana tidak mampu dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak akan memperoleh output program kebijakan. Model implementasi kebijakan dari David Korten inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini Tiga dimensi utama yang ditawarkan Korten akan menjadi rujukan untuk dielaborasi dengan data di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Penelitian Terdahulu Relasi kekuasaan di aras lokal memiliki banyak keunikan yang tidak cukup hanya dikaji dari pendekatan formal saja, melainkan juga perlu dikaji dengan melibatkan jaringan-jaringan informal, termasuk koalisi yang dibangun antara penguasa

dan pengusaha. Pada dasarnya, esensi dari keberadaan negara adalah kebijakan publik karena menjadi bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, maka akan diketahui bahwa sudah ada banyak penelitian yang menyoroti hal tersebut dalam berbagai sudut pandang. Dilihat dari sisi aktor, dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kajian yang melihat pengelolaan sampah dengan menitikberatkan perhatian pada sektor formal dan kajian yang mendalami kehadiran jaringan-jaringan informal dalam pengelolaan sampah melalui keterlibatan pihak swasta.

Termasuk didalamnya berkaitan dengan problematika yang dihadapi hingga melihat hasil dari pola kerjasama itu sendiri. Penelitian dari kelompok pertama misalnya oleh La Ode Agus Said, dkk yang menyoroti masalah yang muncul dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Edward III, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan belum maksimal dilakukan Pemerintah Daerah._

Kajian diatas diperkuat oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Edi Hartono yang menyoroti masalah pengelolaan sampah yang selama ini masih mengandalkan pemerintah daerah saja._ Kelompok kajian kedua melihat kemitraan Pemerintah dan Swasta/masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Ada banyak kajian yang menyoroti keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah, misal kajian Ayu Artiningsih yang menyoroti keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang ke TPA._

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Yumi Puspitawati dan Mardwi Rahdriawan yang melihat pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola sampah._ Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih belum melihat lebih jauh mengenai implementasi kemitraan Pemerintah dan Swasta dengan fokus pada geliat yang terjadi diantara 3 aktor, yaitu pemerintah, pelaksana dan juga penerima manfaat.

Selain itu, titik pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada hasrat untuk melihat seberapa jauh kesuksesan implementasi kebijakan yang mengajak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena dan peristiwa.

Dengan metode studi kasus, maka fakta mengenai kemitraan Pemerintah dan swasta yang dilakukan dalam rangka **pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru** akan digali dari berbagai sumber data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Data penelitian ini terdiri dari **data primer dan data sekunder**. Dalam mengumpulkan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan mengikuti diskusi-diskusi yang berkaitan dengan **pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru**.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan dan diinterpretasikan untuk mengangkat substansi mendasar yang terdapat dibalik kasus yang diteliti. Analisis data ini penting untuk mengungkap temuan substantif maupun temuan formal. Analisis data menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan **untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan** data sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan **masalah yang ingin dijawab**.

Teori implementasi kebijakan digunakan sebagai pisau analisis yang menjadi acuan penelitian dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Pada tahap terakhir, peneliti menyimpulkan hasil penelitian atas temuan dilapangan yang telah diolah berdasarkan teori yang digunakan. **HASIL DAN PEMBAHASAN** Dalam konteks **pengelolaan sampah di kota** Pekanbaru, menilik implementasi penanganan sampah menjadi penting.

Hal ini disebabkan pemerintah kota Pekanbaru dalam urusan pengelolaan sampah telah menggandeng pihak ketiga untuk bermitra dengan pemerintah guna menangani persoalan sampah kota. Setelah kemitraan tercapai antar dua belah pihak (dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Samhana Indah), maka tahapan imlementasi menjadi penting untuk diperhatikan bersama, apakah kenyataan dilapangan **sesuai dengan apa yang** telah dirancang dan disepakati sebelumnya. Berdasarkan MoU antara pemerintah kota Pekanbaru dengan pihak swasta (PT.

Samhana Indah), sistem pengelolaan sampah oleh pihak swasta hanya sebatas pada tahapan proses pengangkutan. Sehingga tahapan perencanaan dan pengawasan/kontrol tetap pada pemerintah Kota Pekanbaru. Mitra kerja untuk tahapan pengangkutan ini dilakukan karena pemerintah kekurangan sumberdaya terutama berkenaan dengan ketersediaan armada/mobil pengangkutan sampah.

Diharapkan kepada pihak pemenang tender dalam hal ini PT. Samhana Indah yang mengelola manajemen pengangkutan sampah di zona 1 bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan di wilayah kerjanya (zonasi). Sejauh ini kinerja pihak swasta mendapat tanggapan positif dari beberapa kalangan, diantaranya yaitu Lurah Simpang

Baru, beliau sangat mengapresiasi pihak swasta yang telah membantu dalam pengangkutan sampah di beberapa titik yang selama ini menimbulkan persoalan.

Menurutnya, pengelolaan sampah (dalam hal pengangkutan) sejatinya lebih efektif jika dikelola oleh pihak swasta._ Demikian pula Camat Tampan berujar bahwa "Setelah pihak swasta dilibatkan dalam penanganan sampah menjadi lebih baik, jalan-jalan protokol kembali bersih meskipun penanganan di tingkat lingkungan belum maksimal karena hal tersebut butuh partisipasi aktif dari masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru tidak sia-sia menggandeng pihak swasta dalam membantu pengelolaan sampah di wilayah kota Pekanbaru._ Oleh karena itu, untuk tercapainya cita-cita pengelolaan sampah kota yang profesional melalui kebijakan swastanisasi, maka kita perlu melihat beberapa variabel sebagai alat ukur kinerja kesuksesan suatu kebijakan pada tahapan implementasi di lapangan.

Sejauh mana efektifitas kebijakan pengelolaan sampah oleh pihak swasta dapat dilihat dari tiga variabel Implementasi Kebijakan menurut David C. Korten; Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat; Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana; Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya: Kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat Pada tahapan ini, titik fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga kota). Pemerintah dalam hal ini merespon akan kebutuhan terhadap pengelolaan sampah merujuk pada agenda nasional dan diteruskan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 60 tahun 2015.

Kesesuaian program yang dirancang oleh pemerintah daerah sejatinya bertujuan untuk "terwujudnya Kota Pekanbaru bersih sampah tahun 2020 menuju metropolitan yang madani", sebagaimana termaktub dalam Peraturan Walikota tahun 2015 pasal 3. Penjelasan soal keberpihakan program ini terhadap penerima manfaat lebih lanjut dijelaskan dalam beberapa butir pasal selanjutnya.

Ini menunjukkan bahwa program ini dirancang atas dasar kebutuhan dan hak warga negara dalam memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan Penanganan Pengelolaan Persampahan dirumuskan dalam beberapa hal, seperti: Pengurangan sampah dimulai dari sumbernya melalui pembatasan timbunan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Peningkatan peran aktif masyarakat

dan dunia usaha/usaha sebagai mitra dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Peningkatan akses pelayanan dan pemanfaatan sampah. Pengembangan kapasitas penyelenggara pengelola sampah. Kemudian, untuk meningkatkan peran aktif dari masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan penanganan sampah, ada beberapa upaya yang akan dilakukan sesuai dengan rancangan program yang telah disusun.

Upaya tersebut meliputi memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah sejak dini kepada anak di tingkat sekolah, memberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ilmu dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Jika hal semacam ini berhasil diterapkan, maka gaya pengelolaan sampah seperti ini akan memberi dampak benefit bagi masyarakat sekitar.

Setelah upaya pengurangan sampah dan keterlibatan aktif masyarakat dilakukan, maka upaya selanjutnya yaitu akses terhadap pelayanan dan pemanfaatan sampah. Adapun program strategis yang ditawarkan adalah mengoptimalkan produk daur ulang sampah seperti kompos yang bisa dijadikan sebagai pupuk organik pada tanaman di sekitar pekarangan rumah. Hal lain yang ditawarkan yaitu pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif (waste to energy).

Pun strategi lain yang bisa diupayakan ialah membangun kemitraan dengan sektor bisnis dalam pemanfaatan hasil daur ulang sampah. Hal yang tidak kalah penting dari tiga strategi yang telah dijelaskan diatas yaitu pengembangan terhadap kapasitas penyelenggara pengelola sampah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilakukan ialah dengan cara peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan dan optimalisasi kelembagaan, peningkatan kelengkapan produk hukum/NSPK sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Dengan demikian, segala ide dan gagasan tentang pengelolaan sampah yang telah tertuang dalam rancangan program kerja nantinya diharapkan berjalan sesuai dengan semestinya. Strategi yang akan dijalankan tentunya memberi dampak positif kepada masyarakat yang merasakan pembangunan pengembangan tata kelola persampahan. Sehingga harapan pemerintah menjadikan kota Pekanbaru bebas sampah dan bersih bisa terwujud dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat.

Oleh karena itu, jika sampah mampu dikelola dengan baik melalui strategi kerja yang tepat guna maka akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana Perda nomor 8 tahun 2014, pasal 4 menjelaskan sistem pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip; keterpaduan,

akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan berkepastian hukum.

Poin ini menguji kesesuaian antara ide **dan rencana yang telah** disusun oleh pemerintah **dengan kemampuan organisasi pelaksana**. Jika pengelolaan sampah melibatkan pihak ketiga (kemitraan) maka pemerintah perlu memastikan bahwa organisasi pelaksana memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka kedepan akan menjadi sebuah bencana bagi khalayak umum.

Berkenaan dengan standar kerja organisasi pelaksana **pengelolaan sampah di Kota** Pekanbaru, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: Memiliki Kapasitas di bidangnya Perusahaan sehat secara finansial Memiliki armada angkut yang memenuhi standar PT. Samhana Indah sebagai organisasi pelaksana yang ditugaskan untuk mengelola masalah sampah wilayah zonasi di Kota Pekanbaru tentunya sudah memenuhi kualifikasi kelayakan sebagai perusahaan yang menangani sampah.

Ini dibuktikan oleh kemampuan finansial perusahaan yang sehat, jumlah armada angkut yang berkualitas, serta yang terpenting adalah PT. Samhana Indah sangat berpengalaman dibidang penanganan sampah kota. Hal tersebut diamini oleh bapak Adrial selaku perwakilan dari PT. Samhana Indah, beliau berujar; "Dalam acuan kerja mitra swasta, kita dituntut mampu membantu program pemerintah kota.

Tentunya kita berpengalaman soal pengangkutan sampah, ada saldo biaya operasional di bank minimal 5 Miliar, kemampuan finansial perusahaan harus sehat, itu syarat wajib. Khusus untuk armada/kendaraan kita disyaratkan memiliki jumlah kendaraan sesuai yang telah ditentukan, umur kendaraan, dan jenis kendaraan. Kendaraan kami di tahun pertama itu berjumlah minimal truk mini kol itu ada 20 truck, ada juga yang besar 3 (sekelas fuso) , yang kecil seperti L300 kami memiliki 8 kendaraan, gerobak motor ada 8 juga, kemudian kita disyaratkan juga punya amrol truk 5 unit, alhamdulillah kita penuhi segala persyaratannya.

Disisi lain juga diimbangi dengan jumlah ritasi sehari berpa minimal, kami disyaratkan 58, kemudian tonase 350, kemudian kita atur lah manajemen kerja di wilayah kerja kita." _ Adapun berdasarkan program penanganann sampah yang meliputi tahapan **pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan** dan pemrosesan akhir sampah, PT. Samhana Indah hanya bertugas pada tahapan "pengangkutan" saja dan itu merupakan kesepakatan kerja (MoU) antara PT. Samhana Indah dengan pihak pemerintah kota Pekanbaru.

Sehingga tugas pokok yang dilakukan oleh pihak kemitran ialah hanya sebatas proses pengangkutan sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengumpulan oleh

masyarakat. Oleh karena itu, upaya perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah melalui produk hukum menjadi acuan dalam implementasi pengelolaan sampah. Ruang lingkup kerja pihak swasta juga telah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan walikota Pekanbaru. Sehingga oleh PT.

Samhana Indah dalam menyusun manajemen kerja juga berdasarkan landasan aturan hukum yang telah ada, jika melenceng dari apa yang tertera dalam kerangka aturan yang telah diatur sebelumnya maka pihak pemerintah melalui dinas terkait berhak mengingatkan dan bahkan bisa menegur langsung kepada pihak swasta selaku penerima mandat pengelolaan sampah.

Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara aksi dari organisasi pelaksana dapat memberi dampak kepada kelompok sasaran (warga kota). Permasalahan sampah yang mendera wilayah kota Pekanbaru merupakan akumulasi dari tingginya konsumsi masyarakat. Akibat budaya masyarakat yang begitu konsumtif, maka produktifitas sampah yang dihasilkan juga tinggi.

Permasalahan sampah kota bukanlah akibat dari aktifitas limbah industri melainkan sumbangan dari sampah rumah tangga. Untuk kelancaran pengangkutan sampah dari komplek perumahan, perkantoran, ruko serta rumah penduduk maka diperlukan ketepatan waktu dalam pembuangan sampah yaitu dilakukan pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Sampah yang menumpuk di jalan dan TPS kemudian diangkut sampai ke TPA.

Perencanaan melalui bentuk undang-undang telah dilakukan, pun demikian dengan manajemen pengangkutan oleh pihak swasta telah disusun. Namun kenyataan dilapangan membuat pihak pengangkutan harus bekerja ekstra karena pengumpulan dan jam buang sampah oleh masyarakat tidak sesuai harapan. Ini merupakan kendala yang dirasakan oleh pihak pengangkut sampah, dimana masyarakat tidak mematuhi jam buang sampah yang telah diinformasikan sebelumnya.

Berikut kutipan hasil wawancaranya; "kendala yang kita hadapi dilapangan yaitu soal jam buang sampah (jam kota bersih mulai jam 7 pagi – 4 sore) dan ketersediaan tong sampah. Jam buang sampah yang tidak sesuai membuat manajemen pengangkutan terganggu, begitu juga dengan sampah yang berserakan akibat tidak tersedianya tong sampah yang memadai yang memudahkan proses pengangkutan.

Tidak adanya tong sampah terkadang membuat sampah berserakan sehingga mengganggu proses pengangkutan dan juga tentu merusak keindahan"._ Kendala yang

terjadi di atas menunjukkan bahwa masyarakat kita masih kurang kooperatif dalam menangani permasalahan sampah secara bersama. Padahal pemerintah melalui peraturan daerah telah menegaskan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8, 9, 10 dan 11 dengan rinci telah dijelaskan bahwa tahapan pemilahan dilakukan oleh masyarakat sejak dari rumah tangga. Berbeda dengan kasus pemilahan sampah rumah tangga, masyarakat juga abai terhadap jam buang sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota yaitu dilakukan pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Kebanyakan dari masyarakat membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan sehingga menyulitkan bagi pihak pengangkutan sampah. Disinilah kemudian manajemen yang tepat dibutuhkan oleh PT. Samhana Indah untuk menyikapi budaya jam buang sampah warga kota yang tidak disiplin. Lebih parahnya lagi, terdapat beberapa oknum masyarakat yang dengan "sadis" membuang sampah ditepian dan bahkan di jalan raya.

Pemandangan semacam ini tentunya bukan barang aneh, terkadang lumrah dijumpai di beberapa ruas jalan utama di kota Pekanbaru. Pertanyaan kemudian adalah perilaku indisipliner masyarakat dalam menjaga jam buang sampah disebabkan oleh faktor apa. Jika disebabkan oleh kurangnya informasi atau sosialisai oleh pemerintah kota, hal ini juga dirasa tidak tepat mengingat pemerintah telah berupaya mensosialisai melalui berbagai cara, semisal sosialisasi melalui siaran radio yang mampu menjangkau seluruh pendengar dimana saja dan tidak terjebak oleh ruang dan waktu.

Pendekatan lain juga dilakukan dengan memerintahkan aparaturnya tingkat desa dan RT/RW untuk menghimbau agar masyarakat tertib dalam jam buang sampah. Korelasi antara ketaatan masyarakat dalam membuang sampah akan memudahkan pihak pengangkutan sampah dalam bekerja. Sehingga dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yaitu kawasan kota yang bersih dari sampah serta memberi kenyamanan.

Bekerjanya simbiosis mutualisme melahirkan kawasan kota yang asri dan bersih dari sampah. KESIMPULAN Implementasi kebijakan swastanisasi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan keberhasilan. Swastanisasi pengelolaan sampah yang dilakukan memberi dampak positif terhadap agenda pemerintah kota Pekanbaru dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PT.

Samhana Indah sebagai pelaksana tahapan pengangkutan sampah pada zona I mampu bekerja secara profesional sehingga permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah bisa diminimalisir. Ini dikarenakan pihak mitra kerja pemerintah memiliki

manajemen kerja yang terukur, ketersediaan armada pengangkutan yang memenuhi standar serta etos kerja yang profesional. Dalam literatur mengenai implementasi kebijakan, David C. Korten membuat model kesesuaian implementasi kebijakan dengan memakai pendekatan proses pembelajaran.

Pertama, kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat. Pada tahapan ini, titik fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga kota). Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif.

Program yang disusun tentunya mengakomodir kebutuhan masyarakat selaku penerima manfaat dari tahapan pengelolaan sampah. Kedua, kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana. Perda nomor 8 tahun 2014, pasal 4 menjelaskan sistem pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip; keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan berkepastian hukum. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT.

Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I menunjukkan sikap profesionalitas. Ini dibuktikan pihak mitra kerja mampu memenuhi segala persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam hal pengelolaan sampah pada tahapan pengangkutan.

Itu dibuktikan bahwa pihak perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Dalam hal implementasi, manajemen kerja PT. Samhana Indah berpedoman pada MoU serta Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Misalnya standar tonase yang telah disepakati perhari sebanyak 350 ton/hari, oleh pihak swasta bahkan mampu mengangkut melebihi standar yang telah ditetapkan yaitu rata-rata tonase mencapai 400 ton/hari.

Ini menunjukkan bahwa program yang telah direncanakan oleh pemerintah mampu diimplementasikan dengan baik berdasarkan kemampuan manajemen yang bermutu oleh pihak swasta (PT. Samhana Indah). Ketiga, kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara aksi dari organisasi pelaksana dapat memberi dampak kepada kelompok sasaran (warga kota).

Permasalahan sampah yang mendera wilayah kota Pekanbaru merupakan akumulasi dari

tingginya konsumsi masyarakat. Akibat budaya masyarakat yang begitu konsumtif, maka produktifitas sampah yang dihasilkan juga tinggi. Permasalahan sampah kota bukanlah akibat dari aktifitas limbah industri melainkan sumbangan dari sampah rumah tangga.

Oleh pihak swasta tentunya telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan dari hadirnya pihak swasta dalam pengelolaan sampah yaitu optimalisasi pada tahapan proses pengangkutan sampah. Namun bukan berarti oleh pihak swasta tidak mendapatkan kendala, ini berkenaan dengan jam buang sampah dan ketersediaan tong sampah sebagai tempat pengumpulan sampah.

Persoalan jam buang sampah, masih banyak masyarakat kita yang tidak membuang sampah pada jam yang telah ditentukan, padahal kebijakan jam kota bersih dimulai sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Kenyataan dilapangan masih ada masyarakat membuang sampah bukan pada jam yang telah ditentukan, karena kebanyakan masih membuang sampah pada waktu bersamaan jam berangkat kerja pagi atau pada saat berbarengan keluar mengantar anak ke sekolah.

Terlebih diperparah oleh kebiasaan oknum masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, tentu ini mempersulit kerja pihak pengangkutan sampah karena sampah tidak dibuang pada tempat yang telah ditentukan. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan **pengelolaan sampah di kota Pekanbaru**. Selama ini pihak swasta dan pemerintah telah membangun komunikasi yang baik dalam tugas dan fungsi kerja masing-masing.

Sedangkan keterlibatan masyarakat masih kurang karena ketidakpatuhan terhadap jam buang sampah. Sehingga diharapkan kepada masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam program kota bersih **yang telah dicanangkan oleh pemerintah** kota Pekanbaru. Hasilnya **lingkungan yang bersih dan** nyaman dirasakan oleh masyarakat Tampan khususnya dan secara umum masyarakat kota Pekanbaru. REFERENSI Ayu Artiningsih.

Peran **Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)**.2008. Tesis Magsiter Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Semarang Basuki, Ananto dan Shofwan. Penguatan Pemerintah Desa berbasis Good Governance. 2006. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) FEUB Birklan, Thomas A. 2001. As Introduction to the Policy Process, Armonk NY: M.E

Sharpe Inc Donahue, John dan Ricard J. Zeckhauser. Kolaborasi Publik-Swasta. Dalam

Moran, Michael, dkk. Handbook Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media Donahue, John dan Ricard J. Zeckhauser. Kolaborasi Publik-Swasta. Dalam Moran, Michael, dkk. Handbook Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media Edi Hartono. **Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan.** 2006.

Tesis Program Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Diponegoro La Ode Agus Said, dkk. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota BauBau. 2015. **Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** (JISIP) Vol 4 No 1 Tahun 2015 Said Fadhil, dkk. Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota dan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan. 2008. Samarinda: LAN Samarinda Tarigan, Antonius dan Haedar. 2008.

Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Vol 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar Tjiptoherijanto, Priyono dan Mandala Manurung. Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya, Jakarta: UI Press Yumi Puspitawati dan Mardwi Rahdriawan. **Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan** Laranagan Kota Cirebon. 2012.

Jurnal **Pembangunan Wilayah & Kota Vol** 8 No 4 Desember 2012 Media Online: Syafruddin Mirohi. Kembali Swastanisasi Sampah DPRD sebut Siapa yang Bisa Jamin Sampah Tidak Bertumpuk Lagi.
<http://www.google.co.id/amp/pekanbaru.tribunnews.com/amp/2017/06/19/kembali-swastanisasi-sampah-dprd-sebut-siapa-yang-bisa-jamin-sampah-tidak-menumpuk-lagi>
diakses tanggal 24 Oktober 2017 pukul 11.00

INTERNET SOURCES:

1% - <https://fisip.unri.ac.id/akademik/kurikulum/ilmu-pemerintahan/>
<1% - <https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/08/ilmu-pemerintahan.html>
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/315060492_Analisis_Kebijakan_Pengelolaan_Sampah_di_Kota_Samarinda_Problematikasi_Kebijakan_Dengan_Pendekatan_WPR
<1% - https://walhi-sumsel.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
<1% - <https://hukumkesehatanblog.wordpress.com/category/hukum-kesehatan/>
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/584/4/Bab%203.pdf>
<1% -
https://www.academia.edu/35779887/KONTRIBUSI_OPTIMALISASI_MAJELIS_TALIM_TERHADAP
1% -

<https://fungsiumum.blogspot.com/2013/10/kriteria-pengukuran-implementasi.html>
<1% -
<http://staff.unila.ac.id/ekobudisulistio/files/2013/09/Peningkatan-Peran-DPRD-di-Era-Otonomi-Daerah-Studi-tentang-Peran-DPRD-di-Kota-Metro.doc>
<1% -
<https://primadonakita.blogspot.com/2014/04/skripsi-dan-makalah-implementasi.html>
<1% - <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KabupatenPacitan-2011-1.pdf>
<1% -
http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/UMRAH.pdf
<1% -
<https://adityarohman03.blogspot.com/2015/04/kualitas-lingkungan-untuk-kelangsungan.html>
<1% - <https://kitabisa.com/campaign/mobilpickupbsm>
<1% -
<https://endanggeographyeducation.blogspot.com/2014/12/makalah-konservasi-lingkungan-hidup.html#!>
<1% - https://issuu.com/jaelani/docs/21_febuari_2014
<1% -
<https://www.waskita.co.id/img/annualreport/files/c2f1e24b8eacddeeb7b001fbd228765f.pdf>
<1% - https://issuu.com/epaper-kmb/docs/snt_24072018
<1% -
<http://halloriau.com/read-pekanbaru-102118-2018-05-01-pt-godang-tua-jaya-batal-kelola-sampah-zona-i-kota-pekanbaru.html>
<1% -
<https://dinadwisantiaa.blogspot.com/2015/03/perekonomian-indonesia-romawi-i-sd-iv.html>
<1% - <https://crackbone.wordpress.com/2010/01/27/>
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/277844111_Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana
<1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43060/Chapter%20II.pdf;sequence=4>
<1% -
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/pendidikan/TAHAPAN+KEBIJAKAN.pdf>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/7qv6ljry-implementasi-kebijakan-tentang-pembuatan>

-surat-keputusan-ijin-trayek-dan-kartu-pengawasan-angkutan-kota-dalam-provinsi-akd
p-pada-badan-pelayanan-perijinan-terpadu-bppt-privinsi-jawa-barat.html

1% - <https://sasminedi-kapus.blogspot.com/2012/10/implementasi-kebijakan.html#!>

<1% - <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/15476>

<1% -

[https://kodirsocialworker.wordpress.com/2015/06/15/analisis-partisipasi-stakeholder-pe
mbangunan-kesejahteraan-sosial-di-balai-persinggahan-sosial-margo-widodo-semaran
g/](https://kodirsocialworker.wordpress.com/2015/06/15/analisis-partisipasi-stakeholder-pe
mbangunan-kesejahteraan-sosial-di-balai-persinggahan-sosial-margo-widodo-semaran
g/)

<1% -

<https://erliknisak.blogspot.com/2013/02/kepemimpinan-kepala-madrasah-dalam.html>

<1% -

[https://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijaka
n-jurnal-baca-agustus-20081.doc](https://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijaka
n-jurnal-baca-agustus-20081.doc)

<1% -

[https://www.avepress.com/paradigma-kritis-dalam-studi-kebijakan-publik-perubahan-d
an-inovasi-kebijakan-publik-dan-ruang-partisipasi-masyarakat-dalam-proses-kebijakan-
publik/](https://www.avepress.com/paradigma-kritis-dalam-studi-kebijakan-publik-perubahan-d
an-inovasi-kebijakan-publik-dan-ruang-partisipasi-masyarakat-dalam-proses-kebijakan-
publik/)

<1% - <https://wargamasyarakat.org/pengertian-masyarakat/>

<1% -

[https://id.123dok.com/document/q0eml53y-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-suatu-re
ncana-pengelolaan-terpadu-das-asahan-danau-toba.html](https://id.123dok.com/document/q0eml53y-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-suatu-re
ncana-pengelolaan-terpadu-das-asahan-danau-toba.html)

<1% - <http://blog.binadarma.ac.id/hardiyansyah/?p=28>

<1% - http://eprints.undip.ac.id/18387/1/Ni_Komang_Ayu_Artiningsih.pdf

<1% -

<https://news.detik.com/berita/d-4808510/bni-ajak-pegawai-cerdas-tangani-sampah>

<1% -

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/TSA-2012-0128%20BAB%202.doc>

<1% -

[https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/11/30/pengamat-pesimis-
kebijakan-swastanisasi-sampah-pekanbaru](https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/11/30/pengamat-pesimis-
kebijakan-swastanisasi-sampah-pekanbaru)

<1% -

[http://docplayer.info/40654214-Bab-iii-metode-penelitian-kasus-menurut-lexy-j-moleo
ng-2007-6-penelitian-kualitatif-adalah.html](http://docplayer.info/40654214-Bab-iii-metode-penelitian-kasus-menurut-lexy-j-moleo
ng-2007-6-penelitian-kualitatif-adalah.html)

<1% - <http://repository.unpas.ac.id/30612/7/Skripsi%20BAB%20III%20-%20Wuri.pdf>

<1% -

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68361/Chapter%20III-V.pdf?seq
uence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68361/Chapter%20III-V.pdf?seq
uence=3&isAllowed=y)

<1% -

<https://www.ilmusaudara.com/2016/06/analisis-data-adalah-sebuah-kegiatan.html>

<1% - <http://semnaspmm.ums.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/BAGIAN-1.pdf>

<1% -

<https://abarky.blogspot.com/2010/08/menhan-launching-pembangunan-kapal.html>

<1% - <http://www.khulafabiotech.com/pengolahan-sampah-bantargebang-semrawut/>

<1% -

<https://uwityangyoyo.wordpress.com/2009/04/05/pengelolaan-sampah-secara-terpadu-di-wilayah-perkotaan/>

<1% - <http://setanon.blogspot.co.id/feeds/posts/default>

<1% -

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/379/256>

<1% -

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=190491&val=6469&title=Efektivitas%20Program%20Asuransi%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20\(TKI\)%20Sebagai%20Upaya%20Pemenuhan%20Hak-hak%20TKI%20\(Studi%20pada%20Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Pelayanan%20Penempatan%20dan%20Perlindungan%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20Surabaya\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=190491&val=6469&title=Efektivitas%20Program%20Asuransi%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20(TKI)%20Sebagai%20Upaya%20Pemenuhan%20Hak-hak%20TKI%20(Studi%20pada%20Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Pelayanan%20Penempatan%20dan%20Perlindungan%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20Surabaya))

<1% -

<https://m.facebook.com/notes/bank-donor-organ-indonesia/pengertian-pelaksanaan-dan-dasar-hukum-jkn-jaminan-kesehatan-nasional/600212306726926/>

<1% - <https://pekanbaru.go.id/p/perda>

<1% -

https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kesehatan/files/2011/04/permenkes_741-spm-20082.pdf

<1% -

<http://eprints.ung.ac.id/94/3/2013-2-86205-121409014-bab2-10012014033442.pdf>

<1% -

<https://faqihmuhammad-fm.blogspot.com/2014/05/pemberdayaan-masyarakat-pembinaan.html>

<1% - <https://www.ekonomidesa.com/2017/10/contoh-peraturan-desa-perdes.html>

<1% -

<https://tatisembilan.blogspot.com/2010/07/ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-ipitek.html>

<1% -

<https://kebijakan-publik.blogspot.com/2011/03/pengembangan-e-government-untuk.html>

<1% - <http://semnasppm.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/BAGIAN-2.pdf>

<1% - <https://www.scribd.com/presentation/370616994/DasarPengelolaanSampah>

<1% -

https://mafiadoc.com/final-bps-kota-jayapura-2013pdf-ppsp_5a1a47681723dde22f22843a.html

<1% - <https://febyspices.blogspot.com/>

<1% -

<https://artikel-opiniku.blogspot.com/2015/08/pengelolaan-sampah-di-kota-makassar.html>

<1% - https://issuu.com/dumaipos.com/docs/dumaipos_22_oktober_2015

<1% -

<https://keslingkawasanpantaipesisir.blogspot.com/2009/11/kelompok-ii-sistem-pengelolaan-sampah.html>

<1% - <https://library.uns.ac.id/kesulitan-belajar-kimia-bagi-siswa-sekolah-menengah/>

<1% -

<https://lifestyle.kompas.com/read/2009/04/10/19420512/Hingga.Pukul.19.00.WIB.Ada.255.Pelanggaran.Pemilu>

<1% -

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdDoc/Bab2DOC/2011-2-00666-MC%20Bab2001.doc>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/q7llg9ky-implementasi-peraturan-daerah-nomor-02-tahun-2011-di-kota-bengkulu-sebagai-upaya-peningkatan-pengelolaan-sampah-unib-scholar-repository.html>

<1% -

<http://jdih.penajamkab.go.id/assets/Peraturan%20Bupati%20No.%2017%20Thn%202014.pdf>

<1% -

<https://regional.kompas.com/read/2016/06/05/22383121/bongkar.muat.cpo.di.pelabuhan.gresik.meningkat>

<1% -

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENGEMBANGAN%20KOMPETENSI%20GURU_0.pdf

<1% - <https://andiyahyat-tik.blogspot.com/2015/04/supervisi-pendidikan.html>

<1% - https://issuu.com/suaramedianasional/docs/suara_media_nasional_edisi_259

<1% - <https://wearejeff.com/blog/cara-menghilangkan-noda-deodoran/?lang=id>

<1% -

<https://www.kompasiana.com/swa.abdas/552dfa586ea834240c8b45b3/pak-jokowi-ane-punye-solusi-untuk-sungai-ciliwung>

<1% - <https://pt.scribd.com/document/176228953/daur-ulang>

<1% - <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/catalogue/2008.html>

<1% - <http://scholar.google.co.id/citations?user=SZGd4ZQAAAAJ&hl=en>

<1% - <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1260>

<1% - https://abstrak.uns.ac.id/wisuda/upload/C9412015_bab5.pdf